

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI PERIODE MEI 2026
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	NIM	Nama	Semester	Kelas	Judul Skripsi	Jenis Penelitian	Dosen Pembimbing	Hasil Seleksi oleh Tim	Hasil Seleksi oleh Tim
1	220202110009	Fadil mahdhi ammash	VIII	Reguler	TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ULASAN PALSU PADA MARKETPLACE PERSPEKTIF TADLIS DAN SYAHADAH AL-ZUR	Yuridis/Kepustakaan		ditolak tidak ada aspek kebaharuan, sudah banyak kajian dengan tema ini	Ditolak
2	220202110009	Fadil Mahdhi Ammash	VIII	Reguler	PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM PAJAK AIRDROP KRIPTO NON-LISTING DALAM PMK NO. 50 TAHUN 2025 : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.	Yuridis/Kepustakaan		ditolak objek kajian tidak jelas	Ditolak
3	230202110103	Halimatus khanifah Azahro	VI	ICP	PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS DI KOPERASI WANITA MOJOREJO BATU)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		ditolak, objek kajian tidak jelas	Ditolak
4	230202110103	Halimatus Khanifah Azahro	VI	ICP	PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (KREDIT MACET) KARENA ANGGOTA KABUR (STUDI KASUS DI KOPERASI WANITA MOJOREJO) PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		ditolak, objek kajian tidak jelas	Ditolak
5	230202110172	Syaqila Zakis Anwar	VI	Reguler	KEABSAHAN PENGGUNAAN GIFT VIRTUAL SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM PENGAJARAN TIKTOK LIVE: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN MAQASHID SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan		ditolak tidak ada persoalan hukum, regulasi yang digunakan tidak sesuai	Ditolak
6	220202110121	Ahmat Listrianto Maulana Abdillah	VIII	Reguler	PENGAWASAN DINAS PARIWISATA KOTA BATU TERHADAP STANDAR KESELAMATAN WAHANA WISATA PASCA BERULANGNYA INSIDEN KECELAKAAN PENGUNJUNG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Batu)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Kurniasih Bahagiati, M.H.	diterima	Diterima
7	220202110121	Ahmat Listrianto Maulana Abdillah	VIII	Reguler	ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN NORMA PENGATURAN STANDAR KESELAMATAN WAHANA WISATA DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN DI KOTA BATU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	Yuridis/Kepustakaan		ditolak, tidak ada problem hukum yang spesifik	Ditolak
8	230202110060	Maulidah Syarifah	VI	Reguler	IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN SEHAT BAGI PENGEMUDI BUS AKAP PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI PT. GUNUNG HARTA TRANSPORT SOLUTIONS)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Mahbub Ainur Rofiq, M.H.	diterima dengan catatan objek kajiannya tidak hanya di Po Gunung Harta, tapi di Po lain yang melayani AKAP seperti Juragan 99, Mtrans, Handoyo, dkk	Diterima
9	220202110113	Rafi Salsabila Harum Jihad	VIII	Reguler	Perlindungan Konsumen Terhadap Hackback Jual Beli Akun Mobile Legend (Studi Kasus Rapspoint)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		ditolak, tidak ada problem hukum, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Hukum positif	Ditolak

10	230202110020	Rina Ardiyana Puspita	VI	Reguler	TATA KELOLA DAN PENGGUNAAN E-KARTU PESANTREN SMART DIGITAL (PSD) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI MBI MAMBAUL FALAH BAWEAN	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum	Diterima, dengan revisi: Fokus penelitian perlu dipersempit pada akad, tata kelola dana, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak finansial santri.	Diterima
11	230202110071	Muhammad Sakhawi Amin	VI	Reguler	IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PASURUAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT (PERPEKSTIF MAQASID AL-SYARI'AH)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		ditolak, penulis harus mempersempit fokus pada penghimpunan zakat digital atau digital fundraising, mengganti istilah masyarakat menjadi muzaki, memperkuat data pra-penelitian di BAZNAS Kabupaten Pasuruan,	Ditolak
12	230202110084	Almer Rafly Khansah	VI	Reguler	ANALISIS KRITERIA DAN BATASAN UNSUR MAISIR DAN GHARAR DALAM PROMOSI PENJUALAN BERBASIS UNDIAN BERHADIAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan	Iffaty Nasyiah, M.H.	Diterima, dengan revisi: Rumusan masalah ke-2 berisiko melebar karena praktik undian berhadiah di Indonesia sangat beragam. Sebaiknya dibatasi pada bentuk-bentuk mekanisme tertentu, seperti undian dengan syarat pembelian, undian gratis, undian berbasis poin, giveaway, atau lucky draw,	Diterima
13	230202110042	Dinda Silvy Faradila	VI	Reguler	IMPLEMENTASI KETENTUAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT PENGEMUDI BUS AKAP BERDASARKAN LAMPIRAN PERMENHUB NOMOR 29 TAHUN 2015 SERTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI DI PT. GUNUNG HARTA TRANSPORT SOLUTIONS)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Ramadhita, M.HI.	Diterima, dengan revisi: agar sesuai dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, penulis harus memperjelas dasar hubungan hukumnya sebagai jasa transportasi/akad layanan, lalu mengaitkannya dengan kewajiban perusahaan menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang. Perspektif maqashid sebaiknya difokuskan pada hifz al-nafs, bukan maqashid secara umum.	Diterima
14	230202110005	Nur Alia Ashshidqiyah	VI	Reguler	PROBLEMATIKA HUKUM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA DI TABANAN (STUDI KASUS LP3H PW MUSLIMAT NU PROVINSI BALI)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, karena objek studi tidak jelas. Judul menyebut LP3H PW Muslimat NU Provinsi Bali, tetapi rumusan masalah pertama berfokus pada pelaku usaha di Tabanan. Artinya, penelitian ini harus jelas apakah fokus utamanya adalah problematika pelaku usaha, peran LP3H, atau hubungan keduanya. Jika keduanya dipakai, maka struktur penelitian harus dibuat seimbang.	Ditolak
15	230202110010	Mohammad Wildan Nur Akbar	VI	Reguler	TANGGUNG JAWAB PENYEWAWA LAHAN SAWAH TERHADAP HASIL PANEN AKIBAT BERAKHIRNYA AKAD IJARAH SEBELUM MASA PANEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANDARKEDUNG MULO KABUPATEN JOMBANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, karena judul masih agak bias karena langsung menekankan "tanggung jawab penyewa". Padahal dalam kasus masa sewa berakhir sebelum panen, belum tentu seluruh beban hukum berada pada penyewa. Bisa jadi perlu dianalisis keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak: pemilik lahan, penyewa, serta status tanaman yang sudah tumbuh di atas objek sewa. Saran perbaikan judul: "Penyelesaian Hak atas	Ditolak
16	230202110046	Muhammad Fathan Mubina	VI	ICP	REFORMULASI HUKUM PERDATA MENGENAI EKSEKUSI ASET DIGITAL DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan	Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H.	Diterima, dengan revisi: Mempersempit objek dari "aset digital" menjadi aset kripto atau memperjelas cakupan aset digital, serta menajamkan perspektif maqashid pada hifz al-mal, kepastian hukum, keadilan eksekusi, dan perlindungan hak kebendaan.	Diterima.

17	220202110086	Adam Malik Siregar	VIII	Reguler	REKONSTRUKSI SUBJEK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN PELIBATAN DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATION (DAO) SEBAGAI NAZHIR DIGITAL	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, karena Ide dasarnya menarik dan memiliki novelty tinggi, tetapi terlalu ambisius untuk skripsi karena menjadikan DAO sebagai subjek hukum nazhir, padahal status hukum DAO sendiri belum jelas dalam sistem hukum Indonesia, bagian penelitian terdahulu bermasalah karena pada tabel terdapat beberapa penelitian yang tidak relevan dengan tema wakaf dan DAO, seperti pengupahan host live streaming TikTok, sistem gaji YouTuber, dan sayembara TikTok.	Ditolak
18	230202110030	Putri Alifia Rizki	VI	Reguler	KEDUDUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, karena gap yang ditawarkan masih belum tajam karena beberapa penelitian terdahulu ternyata sudah membahas kedudukan hukum Koperasi Merah Putih, bahkan mengaitkannya dengan Inpres No. 9 Tahun 2025 dan UU No. 25 Tahun 1992. kemudian objek hukum belum tepat. Jika fokusnya Koperasi Desa Merah Putih, maka regulasi utama sebaiknya bukan hanya UU No. 3 Tahun 2024, tetapi juga UU No. 25 Tahun 1992, PP No. 7 Tahun 2021, Inpres No. 9 Tahun 2025, dan regulasi desa terkait BUMDes/aset desa.	Ditolak
19	230202110104	Elvani Juliansa Erwinata	VI	Reguler	IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS : TERMINAL MADYOPURO MALANG	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Dwi Fidhayanti, S.HI.	angkutan umum, melainkan supir bis. Gunakan juga Permenhub No. 85 Tahun 2018 tentang Ssitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Diterima.
20	230202110099	Abimanyu Ferdiansyah	VI	Reguler	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSETARAAN STANDAR KEAMANAN DALAM LAYANAN ANGKUTAN UMUM (STUDI OTOBUS TERMINAL LANDUNGSARI MALANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, tidak ada problem hukum. Perbedaan fasilitas merupakan konsekuensi layanan yang ditawarkan sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai problem hukum.	Ditolak
21	220202110030	Azzahra Divia Nabila	VIII	Reguler	KEKOSONGAN PENGAWASAN NEGARA TERHADAP PENYELENGGARAAN UMRAH MANDIRI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH	Yuridis/Kepustakaan	Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.	Diterima, dengan perubahan judul Pengawasan Penyelenggaraan Umrah Berbasis Koordinator Non-PPIU Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota.....) untuk lokasinya disarankan di kota dimana terdapat kasus penipuan tersebut	Diterima.
22	230202110110	Farhanah Rhana Hidayati	VI	Reguler	IMPLIKASI HUKUM PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM OLEH JURU SEMBELIH TANPA SERTIFIKAT KOMPETENSI PERSPEKTIF UU NOMOR 33 TAHUN 2014(STUDI KASUS DI KECAMATAN PAITON, KABUPATEN PROBOLINGGO)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.	Diterima, dengan merubah peraturannya menggunakan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan yang di dalam latar belakang sudah dicabut dengan peraturan ini.	Diterima.

23	220202110192	Ummi Pakhriah	VIII	Reguler	PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF PADA DESAIN BORDIR MALANGAN (STUDI PADA PELAKU USAHA DAsTER BORDIR MALANGAN)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Rizka Amaliah, M.Pd.	Diterima dengan rekomendasi perubahan judul Efektivitas Prinsip Deklaratif dalam Perlindungan Hak Cipta Motif Bordir Malangan	Diterima.
24	230202110087	Khalviona Wulan Prastika	VI	Reguler	HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN TERHADAP KETERBUKAAN LABEL GIZI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SPPG GERAK LINTAS ARAH KABUPATEN NGANJUK	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, karena MBG adalah program Pemerintah, maka hubungan antara SPPG dengan pihak sekolah penerima maupun siswanya bukanlah hubungan pelaku usaha dengan konsumen sehingga tidak tepat juga menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Lebih tepat jika menggunakan perspektif pelayanan publik, namun tidak termasuk dalam ranah judul skripsi HES	Ditolak
25	220202110112	Joe Satria Bimantara	VIII	Reguler	IMPIKASI YURIDIS UU CIPTA KERJA TERHADAP KONSEPSI HUKUM AGRARIA NASIONAL: ANALISIS DISHARMONISASI HAK ATAS TANAH PERSPEKTIF UU POKOK AGRARIA	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, sudah banyak diteliti meskipun dengan judul yang tidak sama persis, namun topik ini sudah banyak dibahas dan dalam naskah ini belum ditemukan kebaharuan yang kuat sebagai pembeda	Ditolak
26	230202110065	Sofiatul Maulana	VI	ICP	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PEMILAHAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK DI PASAR BESAR KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, tidak masuk ranah hukum ekonomi maupun hukum ekonomi syariah, melainkan cenderung ke HAN dan hukum lingkungan	Ditolak
27	230202110002	Try Anna Noer Maliya	VI	Reguler	ANALISIS KEPATUHAN PELAKU USAHA INDUSTRI TAHU TERHADAP KEWAJIBAN PERIZINAN LINGKUNGAN (STUDI PADA PABRIK TAHU UD NR PRODUCTION DI DESA SUMBERMULYO KABUPATEN JOMBANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, sudah banyak penelitian serupa, bahkan sudah ada penelitian dengan topik serupa di lokasi yang sama	Ditolak
28	230202110022	M. Faqri Rizqi Ma'arup	VI	Reguler	EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN ACARA MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DAERAH MALANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, karena hasil turnitin 29% dari batas maksimal 25%	Ditolak
29	220202110074	Moh Dahri Ilham A.	VIII	Reguler	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FITUR LEVERAGE DALAM TRADING FOREX ONLINE PADA PLATFORM META TRADER 4 PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, karena judul yang kedua diterima dengan revisi	Ditolak
30	220202110074	Moh Dahri Ilham A.	VIII	Reguler	TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP RENCANA PPN JASA JALAN TOL DALAM RENSTRA DJP 2025 - 2029	Yuridis/Kepustakaan	Iffaty Nasyiah, M.H.	Diterima dengan revisi : https://docs.google.com/document/d/1zoF0xUk2zs6DImlpJU3sL--dQN0eiXhb/edit?usp=sharing&ouid=104084930231381691406&rtopof=true&sd=true	Diterima.
31	220202110136	Bilqis Zahidah Widowati	VIII	Reguler	PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALANG DALAM PENGAWASAN HUKUM PRAKTIK PENGOPLOSAN GAS LPG BERSUBSIDI UNTUK MELINDUNGI KESELAMATAN KONSUMEN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak, karena hasil turnitin 29% dari batas maksimal 25%	Ditolak

32	220202110034	Ahmad Shidqi	VIII	Reguler	ANALISIS RISIKO 'HALAL WASHING' PADA MEKANISME SERTIFIKASI SELF-DECLARE: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM DALAM UU No. 33 TAHUN 2014	Yuridis/Kepustakaan	Prof. Dr. H. Fakhruddin, M.HI	Diterima dengan revisi : https://docs.google.com/document/d/1-OerRNpPLDKcR656oXEhWzFO_qRLjZfa/edit?usp=sharing&oid=104084930231381691406&rtf=true&sd=true	Diterima.
33	220202110034	Ahmad Shidqi	VIII	Reguler	PEMBAYARAN KOMISI TIKTOK AFFILIATE MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, karena judul yang pertama diterima dengan revisi	Ditolak
34	220202110108	Dina Faizatus Soleha	VIII	ICP	GESEK TUNAI MELALUI BUY NOW PAY LATER DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN PRINSIP MUAMALAH	Yuridis/Kepustakaan	Iffaty Nasyiah, M.H.	Diterima dengan revisi : https://docs.google.com/document/d/1twkAZqNqAqZYtkurp_sEQgpKG5Xl3j81/edit?usp=sharing&oid=104084930231381691406&rtf=true&sd=true	Diterima.
35	230202110053	Ardiansyah Bagus Ramadhan	VI	ICP	ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP KLAUSUL FIXED RETURN DAN TA'ZIR MATERIIL DALAM AKTA NOTARIIL MUDHARABAH MUTLAQAH	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, karena judul yang kedua diterima dengan revisi	Ditolak
36	230202110053	Ardiansyah Bagus Ramadhan	VI	ICP	STUDI KOMPARATIF FATWA IJTIMA' ULAMA MUI DAN FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM ASET KRIPTO	Yuridis/Kepustakaan	Mahbub Ainur Rofiq, M.H.	Diterima dengan revisi : https://docs.google.com/document/d/1V7F5YHULFAVCvjN3FizkzA0tLfSMOy/edit?usp=sharing&oid=104084930231381691406&rtf=true&sd=true	Diterima.
37	230202110043	Chumairo	VI	Reguler	KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN HANDPHONE INTER (BLACK MARKET) STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Hersila Astari Pitaloka, M.Pd	Diterima dengan revisi, menambahkan data pra penelitian terkait bukti adanya pelaku usaha yang masih menjual hp inter	Diterima.
38	230202110043	Chumairo	VI	Reguler	PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN HANDPHONE INTER (BLACK MARKET) BERDASARKAN PASAL 73 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019 STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak. Judul pertama sudah diterima	Ditolak
39	220202110075	Alfina Damayanti	VIII	Reguler	KEWENANGAN OJK ATAS PENCEGAHAN PRAKTIK JUAL BELI KARTU AUTOMATIC TELLER MACHINE (STUDI DI KOTA MALANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Ramadhita, M.HI.	Diterima dengan revisi. Variabelnya diganti bukan kewenangan, tapi implementasi dari kewenangan tersebut.	Diterima.
40	230202110062	MIFTAKHUL ULA IRZALIA FEBRIANTI	VI	Reguler	DISHARMONISASI PENGATURAN PERIZINAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DENGAN KESESUAIAN TATA RUANG DALAM PERIZINAN BERUSAHA PARIWISATA	Yuridis/Kepustakaan	Rizka Amaliah, M.Pd.	Diterima dengan revisi. Khususnya, redaksional judul memakai 'usaha pariwisata'	Diterima.
41	220202110156	Nikmatus Sholihah	VIII	Reguler	PENGAWASAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI SEKTOR USAHA LAUNDRY UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN USAHA DARI RISIKO KEBAKARAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.	Diterima dengan revisi. Redaksional judul diganti "PENGENDALIAN ROKOK ILEGAL DI TANJUNG PINANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 DAN MAQASID SYARIAH"	Diterima.

42	230202110077	Adinda Dwi Rahmawati	VI	Reguler	IMPLIKASI HUKUM PENERBITAN SURAT PELEPASAN TANAH ADAT GANDA OLEH LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA) MALAMOI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERTANAHAN DI KOTA SORONG	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Ramadhita, M.HI.	Diterima	Diterima.
43	230202110173	Muh. Zidan Syaikhah Rahman	VI	Reguler	KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASLAHAH MURSALAH	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak. Penelitian tentang topik yang sama sudah banyak. Kebaruan yang ditawarkan hanya dari sudut pandang 'masalah mursalah'. Sebaiknya, mencari variabel masalah yang lebih spesifik dan khusus.	Ditolak
44	230202110068	Tharin Nadhira Aditya	VI	Reguler	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OTOBUS BAGONG ATAS PENETAPAN TARGET SETORAN SUPIR SEBAGAI MITIGASI RESIKO KECELAKAAN (STUDI OTOBUS DI TERMINAL LANDUNGSARI KOTA MALANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris	Kurniasih Bahagiati, M.H.	Diterima.	Diterima.
45	230202110068	Tharin Nadhira Aditya	VI	Reguler	PRAKTIK PENETAPAN TARGET SETORAN SUPIR BUS DAN IMPLIKASI TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI OTOBUS TERMINAL LANDUNGSARI KOTA MALANG)	Empiris/Lapangan/Yuridis Empiris		Ditolak karena judul pertama sudah diterima	Ditolak